



Tata Kelola Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Hikmah Muhaimin

Dosen Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Majapahit
hikmahmuhaimin@gmail.com

Abstrak

UU telah mengatur tentang hak untuk mengelolah potensi desa salah satunya dalam sektor pariwisata. Pembangunan desa wisata merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Pembangunan desa berbasis wisata tidak semerta-merta, melainkan perlu memperhatikan potensi desa yang ada di wilayah tersebut. Begitu pula dengan Desa Ketapanrame, kepala desa setempat menemukan ada potensi untuk dijadikan desa wisata. Dengan demikian, perangkat desa dan masyarakat bekerja sama guna merealisasikannya, salah satunya adalah Taman Ganjaran. Taman Ganjaran ini *digadang-gadang* menjadi alun-alun Desa Ketapanrame. Dengan adanya Taman Ganjaran ini perangkat desa berharap akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Selain itu, untuk kedepannya pemerintah desa juga akan membangun inovasi-inovasi lain guna tetap mempertahankan jumlah pengunjung yang datang.

Kata Kunci : Pariwisata, Potensi Desa, Taman Ganjaran

Abstract

The law regulates the right to manage village potential, one of which is in the tourism sector. The development of tourist villages is a realization of the implementation of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Autonomy. Tourism-based village development needs to pay attention to the potential of villages in the region. Likewise with Ketapanrame Village, the local village head there found the potential to become a tourist village. Thus, the village apparatus and the community work together to make it happen, one of which is Ganjaran Park. This Ganjaran Park is predicted to become the Ketapanrame Village square. With the existence of the Ganjaran Park, village officials hope to be able to improve the economy of the Ketapanrame Village community. In addition, for the future the village government will also build other innovations in order to keep the number of visitors coming.

Keyword : Tourism, Village Potency, Ganjaran Park

Pendahuluan

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus yang dapat mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, sepatutnya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, (2) perencanaan penggunaan lahan, (3) perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan (5) perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

Pembangunan desa wisata merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaannya, apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas tetapi hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Pengembangan desa wisata (*tourism village*) merupakan salah satu alternatif yang dipandang sangat strategis untuk menjawab sejumlah isu global dan nasional terkait dengan pariwisata seperti konservasi lingkungan, pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, komunitas, serta budaya lokal tersebut.

Dengan demikian isu tentang pembangunan potensi desa berbasis pariwisata semakin gencar terdengar di berbagai daerah. Hal serupa juga terjadi di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Di Desa Ketapanrame ini dikenal memiliki sosok pemimpin (kepala desa) yang tegar, berdedikasi tinggi dan berkepribadian supel kepada setiap orang tanpa memandang tinggi rendahnya martabat seseorang serta berjiwa sosial. Kepala Desa Ketapanrame adalah H. Zainul Arifin. SE. Dengan pemimpin yang mempunyai karakter dan karisma kuat, sehingga mampu menjadikan Desa Ketapanrame sebagai lirikan masyarakat guna berwisata, salah satunya yang saat ini sedang tren adalah Taman Wisata Ghanjaran. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas perlu di ketahui “ tata kelola pariwisata dalam pengembangan potensi desa ketapanrame kecamatan trawas kabupaten.

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimanakah tata kelola dalam pengembangan potensi desa ketapanrame, serta hambatan dan dukungan dalam proses realisasi pembangunan potensi desa berbasis wisata khususnya Taman Wisata Ganjaran, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto?

Tinjauan Konseptual dan Teoritik

Teori *AGIL* untuk Pengembangan Keorganisasian Pemerintah Desa

Organisasi pemerintah desa merupakan salah satu bentuk organisasi sosial terkecil dalam suatu negara. Analisis pengembangan keorganisasian pemerintah desa menggunakan teori fungsional-struktural karena ciri-ciri umum yang dimiliki teori ini dapat digunakan pada kondisi masyarakat desa dan organisasi pemerintahan sebagai objek kajian. Menurut *Van den Berghe* (dalam *Lauer*, 1989 : 105-106) mengatakan bahwa teori fungsional struktural memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Masyarakat harus dianalisis secara keseluruhan, selaku sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan
- b. Hubungan sebab akibatnya bersifat “jamak dan timbal balik”
- c. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan “keseimbangan dinamis”, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal dalam sistem itu
- d. Integrasi sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan namun cenderung dinetralisasikan melalui institusionalisasi

- e. Perubahan sosial pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian daripada perubahan revolusioner
- f. Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi dan melalui penemuan-penemuan internal
- g. Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama

Parsons mengembangkan kerangka model A-G-I-L dengan 4 syarat fungsional yang harus dipenuhi antara lain :

- a. *A-Adaptation*, menunjuk pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungan
- b. *G-Goal Attainment*, merupakan persyaratan fungsional yang muncul berdasarkan pandangan bahwa setiap tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu
- c. *I-Integration*, merupakan prasyarat yang berhubungan dengan antar hubungan para anggota dalam sistem sosial
- d. *Latency*, memelihara dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Teori Kepemimpinan

Proses mempengaruhi dari seorang pemimpin melahirkan teori tentang kepemimpinan, teori-teori ini adalah :

- a. Teori karakteristik
- b. Teori gaya
- c. Teori kontingensi

Teori karakteristik personalitas bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa individu lebih penting dari situasi. Teori gaya berasumsi bahwa seorang karyawan akan bekerja giat jika seorang pemimpin menerapkan gaya tertentu dalam menjalankan kegiatan. Kedua teori ini mendapat banyak kritikan sehingga menghasilkan teori kontingensi yang memperhitungkan variabel khusus yang terlibat dalam situasi kepemimpinan terutama pada posisi seseorang. Menurut Yukl (2005: 252) bahwa Model Kontingensi yang komprehensif mengenai kepemimpinan telah disusun oleh Fred Fiedler. Model kontingensi Fiedler itu mengemukakan, bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya interaksi pemimpin dengan

bawahnya, dan derajat sejauh mana situasi memungkinkan kelompok itu untuk mengendalikan dan mempengaruhi. Model itu didasarkan pada anggapan, bahwa kepemimpinan itu paling efektif pada situasi yang berbeda, dan kemudian mengidentifikasi kombinasi yang pas antara gaya dan situasi.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Ketapanrame Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap penentuan Objek Penelitian

Pada tahap ini penulis melakukan penentuan objek dengan meneliti sebuah potensi desa dalam masyarakat dan pemerintahan di Desa Ketapanrame

2. Observasi Lapangan Awal

Tahap ini Penulis melakukan observasi, observasi yang dimaksudkan adalah observasi lapangan ke Taman Wisata Ghanjaran yang saat ini menjadi salah satu icon di Desa Ketapanrame dan pemerintah Desa Ketapanrame

3. Tahap Identifikasi Masalah

Setelah melakukan observasi lapangan maka ditemukan suatu permasalahan dimana dalam pembangunan maupun pengelolaan Wisata Ganjaran tidak akan terlepas dari pemerintah desa setempat, dimana keduanya saling bekerjasama guna pengelolaan Wisata Desa Ganjaran. Kerjasama yang dimaksud adalah masyarakat Desa Ketapanrame dan Pemerintah Desa Ketapanrame

4. Tahap Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Memperoleh informasi yang sesungguhnya terdapat di lapangan sehingga dapat melengkapi data maupun informasi dan teori-teori yang tertulis di dalam literatur atau buku sumber.

Hasil dan Pembahasan

Desa Ketapanrame merupakan desa wilayah daerah pegunungan yang berada di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Masyarakat Desa Ketapanrame mayoritas bermata pencaharian dalam pertanian, peternakan dan perdagangan. Letak Desa Ketapanrame merupakan desa yang paling ujung di Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Jarak dari pusat

pemerintahan desa ke Kecamatan Trawas $\pm 0,5$ km dan ke Kabupaten Mojokerto ± 45 km. Desa Ketapanrame dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Ketapanrame, Dusun Sukorame, dan Dusun Slepri. Luas desa ini sekitar ± 345.460 Ha. Diketahui bahwa permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja. Salah satunya adalah dengan membangun Wisata Desa atau yang terkini adalah Wisata Taman Ganjaran. Dengan situasi desa yang banyak dikelilingi vila baik keluarga maupun *outbond* dan wisata-wisata lainnya, pembangunan Wisata Taman Ganjaran ini bisa dibilang sangat efektif guna memperbaiki perekonomian masyarakat desa setempat.



Gambar 1.1

Wisata Taman Ganjaran diresmikan oleh Bupati Mojokerto pada tanggal 8 Desember 2018. Sebulan sebelumnya tepatnya pada tanggal 8 November taman ini *launching* untuk stand-stand *foodcourt*. Hal itu karena menurut perangkat desa apabila *launching* dan peresmian bertepatan di hari dan tanggal yang sama, maka tidak akan ada progress yang terjadi. Wisata Taman Ganjaran terletak di jalur utama Mojokerto-Tretes (Pasuruan). Asal mula nama Ganjaran adalah dari nama tempat tersebut. Tempat yang dimaksud adalah tanah kas desa yang memiliki sebutan lain yang berarti *ganjaran*. Tanah tersebut merupakan tanah kas desa yang digunakan oleh perangkat untuk tambahan gaji. Selain itu sejak awal perangkat Desa Ketapanrame sudah berkomitmen bahwa sekalipun selama ini kurang mendapat hasil yang optimal dari tanah tersebut karena memang nilai

fungsi dan tingkat kesuburan tanah yang kecil. Akhirnya perangkat desa merelakan hak kepada masyarakat untuk usaha. Perangkat desa berharap agar mendapat *ganjaran* pahala atas pengabdian tersebut. Oleh karena itu, di Wisata Taman Ganjaran juga terdapat patung pahala berukuran besar di dalamnya.

Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas merupakan desa yang terletak di wilayah pegunungan, sehingga hawa yang sejuk meskipun disiang hari akan menambah nilai poin untuk pengembangan desa pariwisata. Awalnya pembangunan dari Wisata Taman Ganjaran ini bermula karena Kepala Desa Ketapanrame menginginkan agar Desa Ketapanrame mempunyai icon untuk PAD masyarakat dan PAD Desa. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah mempunyai potensi tanah kas desa yang dipakai untuk dikerjakan oleh perangkat desa yang mempunyai nilai manfaat minim, jika ditotal perangkat desa dalam satu tahun hanya menghasilkan $\pm 14-15$ juta. Dari sini muncullah semacam pemikiran untuk menjadikan tanah tersebut semacam *rest area* atau wahana permainan yang diharapkan mampu menambah pendapatan perangkat desa dan ekonomi masyarakat.

Konsep tersebut akhirnya diajukan ke Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan dana bantuan. Konsep tersebut berupa Taman Ganjaran, *waterpark* atau kolam renang, gedung pertemuan di depan Balai Desa Ketapanrame, *rest area*, *food court* dan pasar buah. Dengan adanya rencana pembangunan tersebut, Desa Ketapanrame mendapatkan dana 5 M dari kabupaten daerah. Akhirnya dengan dana tersebut, perangkat desa mengatur bahwa tahun pertama yang didahulukan adalah Taman Ganjaran, tahun kedua adalah *waterpark* atau kolam renang, tahun ketiga adalah *rest area*, pasar buah, dan gedung pertemuan.



Gambar 1.2 Taman di Wisata Taman Ganjaran

Dalam perencanaan dan pembangunan desa berbasis pariwisata tersebut khususnya Wisata Taman Ganjaran tentu perangkat desa tidak menjalankan seorang diri. Pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut adalah masyarakat dan perangkat desa. Pemerintah desa mempertimbangkan bahwa memang hal tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat desa setempat sehingga tidak adanya intervensi dari pihak luar baik itu kabupaten atau swasta. Begitu pula dengan wahana-wahana yang ada di Taman Ganjaran, wahana tersebut merupakan milik dari masyarakat. Wahana tersebut termasuk wahana bermain dan wahana *foodcourt*. Dengan adanya Taman Ganjaran ini pihak BUMDES mendapatkan 20% dari masyarakat yang berpartisipasi didalam taman ini. Dengan adanya Taman Wisata Ganjaran ini juga mulai memperlihatkan perubahan ekonomi masyarakat.



Gambar 1.3 Area Wahana di Taman Ganjaran

Di dalam Taman Wisata memang tidak hanya wahana permainan melainkan juga *foodcourt*. Di area *foodcourt* disediakan warung atau stan tetap yang hanya berjumlah 16 stan. Stan tersebut dikhususkan untuk masyarakat Desa Ketapanrame dengan biaya sewa Rp100.000,00/bulan. Untuk masyarakat umum yang bukan masyarakat Desa Ketapanrame masih disediakan tempat untuk pedagang kaki lima yang notabennya tidak menetap. Dari hal tersebut ternyata menyebabkan kecemburuan dari masyarakat Desa Ketapanrame sehingga area *foodcourt* dikhususkan masyarakat Desa Ketapanrame dan

pedagang kaki lima untuk masyarakat umum berada di seberang jalan pasar malam. Pasar malam ini letaknya tepat berada di samping Taman Ganjaran dan merupakan satu area.



Gambar 1.4 Area *foodcourt* Taman Ganjaran

Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa, tentunya akan menambah nilai poin keakraban dan kepercayaan di kedua pihak. Meskipun keterlibatan masyarakat tidak sepenuhnya satu desa akan tetapi perwakilan dari beberapa masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang dimaksudkan adalah perencanaan awal melalui musrembang, dimusyawarahkan kepada masyarakat bahwa tahun depan akan mengadakan suatu program kegiatan tertentu dan disepakati oleh masyarakat. Untuk tahun pelaksanaan tersebut, masyarakat terlibat kembali dalam menentukan pihak-pihak masyarakat yang akan terlibat yang dibentuk dengan TPK. TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal ini pemerintah desa lepas karena pemerintah desa sebagai pemilik. Pemerintah desa menyerahkan tindakan kerja kepada TPK dan TPK itu sendiri dibentuk dari masyarakat. Perangkat desa berperan dalam penentuan tanggal untuk program kegiatan yang disepakati dan apabila terdapat progress TPK akan melaporkan kepada kepala desa. Hak yang dilimpahkan ke TKP dapat berupa belanja, pembayaran belanja, pengadaan barang dan jasa, pengupahan tenaga kerja dan pencarian tenaga kerja. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa TPK memerlukan bantuan pihak ke 3. Pihak ke 3 yang dimaksud bisa berupa konsultan maupun akademis yang membantu dalam membukukan anggaran belanja, analisa belanja dan perhitungan konstruksi

bangunan. Kemudian hasil akhir akan disampaikan saat laporan. Keterlibatan TPK adalah TPK mengerjakan dan diselesaikan atas perintah dari Kepala Desa, dan dilaporkan ke Kepala Desa. Ketika mereka melaporkan kepada pemerintah desa, maka pemerintah desapun menyampaikan hak-hak desa. Desa melimpahkan kewenangannya untuk mengelola kepada BUMDES. Dalam hal ini BUMDES juga melibatkan Karangtaruna dan masyarakat.

Bisa dikatakan bahwa TPK merupakan pengerjaan fisiknya, sedangkan BUMDES adalah pengelola atau pemanfaatannya. Menurut Kepala Desa Ketapanrame, Karangtaruna sementara berperan dalam membantu mengatur parkir dan inovasi-inovasi lain seperti turut mengelola atau memanfaatkan barang-barang atau hal-hal yang tidak terpakai. Karang taruna di Desa Ketapanrame terbagi dalam beberapa kelompok, yang pertama kelompok usaha produktif, yang kedua kelompok pecinta burung, yang ketiga kelompok pengelola wisata.

Pemerintah Desa Ketapanrame menyadari bahwa dalam perencanaan dan pembangunan suatu program akan menemukan pro kontra. Untungnya pemerintah desa tidak menemukan hambatan saat prosen pembangunan karena memang Kepala Desa Ketapanrame telah menyampaikan bahwa tanah yang akan dipakai untuk wisata tersebut merupakan hak perangkat desa yang diberikan kepada masyarakat. Saat proses realisasi Taman Ganjaran pemerintah desa menikai tidak ada kendala yang terjadi, namun pro kontra malah terjadi setelah selesai pembangunan. Hal tersebut dikarenakan hanya beberapa masyarakat yang bisa memanfaatkan Taman Ganjaran, untuk saat ini memang taman tersebut dianggap mempunyai fasilitas yang kurang lengkap jika harus menampung masyarakat Desa Ketapanrame sepenuhnya. Perangkat desa hanya mampu memenuhi sekitar 30% masyarakat, sehingga dari 70% ini merasa belum mendapatkan nilai manfaat dengan adanya Taman Ganjaran. Sehingga perangkat desa mengupayakan agar dari 70% tersebut turut merasakan manfaat dari keberadaan Taman Ganjaran.

Dalam pengelolaan potensi desa memang tidak hanya semata-merta selama proses pembangunan, namun juga pemanfaatan setelahnya. Dalam beberapa kasus seringkali terjadi wisata yang hanya terkenal di awal peresmian saja. Oleh karena itu, pemerintah desa khususnya Kepala Desa Ketapanrame mempunyai beberapa langkah agar wisata yang ada di Desa Ketapanrame khususnya Taman Ganjaran ini tetap menarik wisatawan, antara lain yang pertama yaitu tetap mempertahankan kuliner,

menambah inovasi wahana, menambah wahana penyangga, dan dalam tahap perencanaan akan membangun kampung petani serta edukasi pertanian. Dengan demikian perangkat desa berharap agar wisata Taman Ganjaran dan sekitarnya tetap menarik perhatian pengunjung, sehingga secara perlahan ekonomi masyarakat Desa Ketapanrame pun akan semakin membaik.

Simpulan

Pengelolaan potensi dalam suatu desa merupakan hal yang penting. Perangkat desa dan khususnya Kepala Desa setempat tentu harus benar-benar memahami potensi desa yang ada di desa tersebut. hal tersebut dikarenakan apabila pengelolaan potensi desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan taraf hidup masyarakat setempat akan meningkat pula. Maka pemilihan pemimpin dalam suatu daerah tentu harus difikirkan dengan baik oleh masyarakatnya, karena kelangsungan daerah/lembaga/organisasi terletak dari bagaimana pemimpin dalam mengelolanya.

Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas, kepala desa setempat mengetahui bahwa wilayah desa yang terletak di pegunungan maka berpotensi untuk menjadi sebuah desa wisata. Maka guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dibangunlah Wisata Taman Ganjaran. Tidak hanya itu, dalam proses perencanaan akan dibangun pula *waterpark* atau kolam renang, *rest area* dan pasar buah. Dengan adanya Wisata Taman Ganjaran ini, Kepala Desa Ketapanrame mengakui bahwa perlahan tingkat ekonomi masyarakat semakin membaik.

Pada dasarnya membangun atau mengelolah potensi desa menjadi pariwisata merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Dalam artian untuk proses realisasi juga dibutuhkan keberanian dari perangkat desa atau kepala desa itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut karena banyaknya wisata baru yang cenderung gagal menarik pengunjung atau bahkan wisata yang hanya menarik pengunjung di awal-awal pembukaan saja.

Tata kelola dalam pengembangan potensi desa berbasis pariwisata di Desa Ketapanrame ini merupakan salah satu bukti dimana pemerintah desa mampu mengajak

masyarakat bekerja sama guna merealisasikan tujuan bersama. Dari sini bisa dikatakan bahwa perangkat desa atau kepala desa khususnya mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dimana tidak semua pemimpin bisa melakukan hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Widarto, 2013. “Kepemimpinan (*Leadership*)”. Jurnal Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
- Soekanto, dan Budi, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Rivai, Veithal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Raja Grafindo. Jakarta.